

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT DALAM PENEGAKAN HUKUM PENATAAN
RUANG PADA KAWASAN RAWAN BENCANA LEMBAH
ANAI PERSPEKTIFSIYASAH DUSTURIYAH**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Tata Negara*



**Oleh :
ALDO RIZONA
NIM. 2213030135**

**HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
2026M / 1448H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

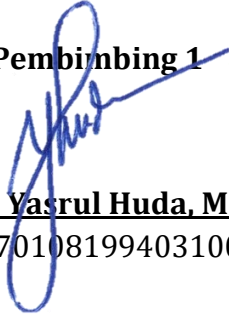
Skripsi dengan judul "*Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Penegakan Hukum Penataan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana Lembah Anai Perspektif Siyasah Dusturiyah*" yang disusun oleh **Aldo Rizona NIM 2213030135** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasah Skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

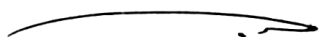
Padang, 31 Agustus 2026

Disetujui Oleh:

Pembimbing 1


Prof. Dr. Yasrul Huda, M.A.
NIP. 196701081994031003

Pembimbing 2


Neni Yuherlis, S.HI., M.H
NIP. 198612162019032011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Penegakan Hukum Penataan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana Lembah Anai Perspektif Siyasah Dusturiah** yang disusun oleh **Aldo Rizona** dengan NIM **2213030135** Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari tim penguji sidang munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : September 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Prof. Nelmawarni, M.Ag., Ph.D.
NIP. 197106151997032001

Penguji I

Dr. Duhriah, M.Ag.

NIP. 197701122007012024

Penguji II

Prof. Dr. Yasrul Huda, M.A.

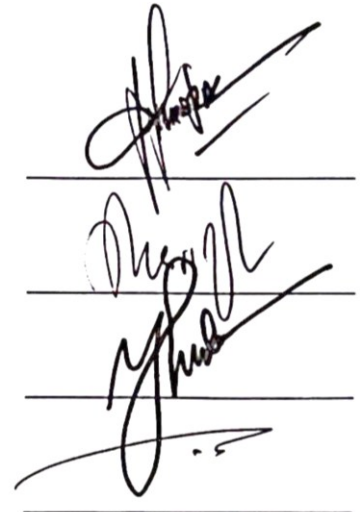
NIP. 196701081994031003

Pembimbing I

Neni Yuherlis, S.HI., M.H

NIP. 198612162019032011

Pembimbing II



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Alfadli, M. Ag
NIP. 197212131998031002

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi yang berjudul "**Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Penegakan Hukum Penataan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana Lembah Anai Perspektif Siyasah Dusturiah**" tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, September 2026
Yang membuat pernyataan



Aldo Rizona
NIM. 2213030135

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldo Rizona

NIM : 2213030135

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Penegakan Hukum Penataan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana Lembah Anai Perspektif Siyasah Dusturiah**

Dengan ini saya menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, September 2026

Yang membuat pernyataan



Aldo Rizona

NIM. 2213030135

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada seluruh hamba-Nya di muka bumi ini, terutama kepada penulis yang telah diberikan kesehatan, kesempatan, dan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Penegakan Hukum Penataan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana Lembah Anai Perspektif Siyasah Dusturiyah"** ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Shalawat beriring salam penulis doakan kepada Allah SWT semoga disampaikan buat junjungan Nabi Muhammad SAW, beliaulah yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman islamiyah, dari alam yang tidak berilmu pengetahuan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Pada proses penyusunannya, skripsi ini tidak dapat diselesaikan begitu saja tanpa adanya motivasi, dorongan, serta bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda **Fendrizon** dan Ibunda **Rina Husi Yanti**, atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, serta selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, dan doa dalam keadaan apa pun agar penulis mampu bertahan

melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi di masa depan. Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd. beserta Wakil Rektor I Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D., Wakil Rektor II Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag., dan Wakil Rektor III Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk kuliah dan menjadi mahasiswa di UIN Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Dr. Alfadli, M.Ag., Wakil Dekan I Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag., Wakil Dekan II Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Duhriah, M.Ag., yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag. dan Sekretaris Program Studi Bapak Dr. Eskarni Ushalli, Lc., M.A., serta dosen, karyawan, dan karyawan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan fasilitas, kesempatan menimba ilmu, dan pelayanan dengan baik selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Yasrul Huda, M.A. selaku Pembimbing I penulis. Terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktu dan tenaga di tengah kesibukan Bapak serta memberikan ilmu dan arahnya kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Neni Yuherlis, S.HI., M.H. selaku Pembimbing II penulis. Terima kasih kepada Ibu karena di tengah kesibukan Ibu masih bisa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, koreksi, dan petunjuk penulisan yang benar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Pimpinan dan staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang serta pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam memperoleh bahan hukum dan literatur yang diperlukan dalam penelitian ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2022 dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas kebersamaan, semangat, dan bantuannya selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan umur panjang, limpahan keberkahan, serta membalas segala kebaikan dan ketulusan Bapak/Ibu dosen, para pembimbing, dan teman-teman yang telah mendampingi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi siapa pun yang membacanya.

Padang, 31 Agustus 2026

Penulis,



Aldo Rizona

NIM. 2213030135

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Penegakan Hukum Penataan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana Lembah Anai Perspektif Siyasah Dusturiyah", disusun oleh Aldo Rizona, NIM: 2213030135, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bangunan pada sempadan Sungai Batang Anai di Lembah Anai, kawasan rawan bencana, yang tetap berdiri meskipun telah dinyatakan melanggar rencana tata ruang. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan, yaitu bagaimana kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari prinsip akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat, serta bagaimana kewenangan tersebut menurut perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan dua hal. Pertama, kewenangan tersebut bersifat atributif, sah, dan tidak mengandung cacat wewenang, sebagaimana dikuatkan putusan pengadilan yang menolak seluruh gugatan; namun ditinjau dari ketiga prinsip tersebut pelaksanaannya belum sepenuhnya terwujud, karena tiga dari delapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak terpenuhi secara utuh, yaitu asas kepastian hukum, kecermatan, dan pelayanan yang baik, yang ketiganya bermuara pada keterlambatan penanganan. Kedua, dari perspektif Siyasah Dusturiyah, arah kebijakan penertiban telah sesuai dengan kaidah tasharruf al-imam 'ala al-ra'iiyah manuthun bi al-maslahah, tetapi kewajiban hifz an-nafs belum tertunaikan pada saat paling dibutuhkan. Disimpulkan bahwa keabsahan tindakan menurut hukum positif tidak dengan sendirinya berarti tertunaikannya kewajiban ulil amri menurut Siyasah Dusturiyah.

Kata Kunci: kewenangan pemerintah provinsi, penegakan hukum penataan ruang, kawasan rawan bencana, Lembah Anai, Siyasah Dusturiyah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Pertanyaan Penelitian	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Signifikansi Penelitian	9
1.6 Studi Literatur	10
1.7 Kerangka Teori	16
1.8 Metode Penelitian.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	25
2.1 Teori Siyasah Dusturiyah.....	25
2.2 Teori Negara Hukum (Rechtsstaat).....	31
2.3 Teori Kewenangan.....	35
BAB III REGULASI TATA RUANG	39
3.1 Regulasi Penataan Ruang.....	39
3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.....	43
3.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	51
3.4 Transisi Regulasi Rencana Tata Ruang Wilayah: dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 (dicabut) ke Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025	55
3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai	60
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.....	67
4.1 Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Penegakan Hukum Penataan Ruang di Lembah Anai Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	67
4.2 Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Penegakan Hukum Penataan Ruang di Lembah Anai Perspektif Siyasah Dusturiyah	103
BAB V PENUTUP.....	112

5.1 Kesimpulan	112
5.2 Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN	120